

Sinergi Kepemimpinan Kolaboratif : Etika Sebagai Pilar Mencerahkan dalam Tata Kelola Pemerintahan

Ratna Indriasari

¹Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara

e-mail: ratna.indriasari@stipan.ac.id

Abstrak

Pentingnya etika penyelenggaraan negara dalam konteks kolaborasi antar personil dalam kepemimpinan pemerintahan. Etika sering diabaikan, memicu potensi permasalahan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme melalui pendekatan kualitatif dan studi kepustakaan pada makalah ini menjelaskan implementasi etika penyelenggaraan negara dalam kolaborasi antar personil. Hasil dari pembahasan menunjukkan bahwa etika pemerintahan memegang peran sentral dalam menciptakan Good Governance, melibatkan aspek profesionalisme, integritas, serta pengaruh pada moral dan nilai-nilai yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Pentingnya etika pemerintahan tidak sekedar menetapkan batasan bagi aparat pemerintahan, tetapi juga mencakup upaya berkelanjutan dalam meningkatkan profesionalisme, agat tindakan dan perilaku mencerminkan refleksi etis yang bermanfaat bagi pelayanan kepada masyarakat. Dalam konteks kolaborasi, etika penyelenggaraan negara menjadi krusial, kolaborasi antar personil dalam kepemimpinan pemerintahan memerlukan etika yang melibatkan individu, organisasi, dan profesi guna menjaga profesionalisme, integritas, serta mencegah masalah korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kepemimpinan kolaboratif sukses memerlukan etika penyelenggaraan pemerintahan untuk efektivitas membangun kepercayaan, menghindari konflik kepentingan, dan memotivasi anggota tim mencapai tujuan bersama.

Kata kunci: *Etika, Kolaborasi, Kepemimpinan Kolaboratif*

Abstract

The importance of organizational ethics in the context of collaboration between personnel in government leadership government leadership. Ethics are often ignored, triggering potential problems such as corruption, collusion, and nepotism through a qualitative approach and literature study. This paper explains the implementation of the ethics of state administration in the in collaboration between personnel. The results of the discussion show that government ethics plays a vital role in creating Good Governance, involving aspects of professionalism, integrity, and influence on morals and values that support the welfare of society. that support the welfare of society. The importance of government ethics is not the importance of government ethics is not just setting boundaries for government officials, but also includes ongoing efforts to improve professionalism, so that actions and behaviors continuous efforts to improve professionalism, so that actions and behaviors reflect ethical reflections that are beneficial to society. actions and behaviors reflect ethical reflection that is beneficial to service to the community. In the context of collaboration, the ethics of state administration is crucial, as collaboration collaboration between personnel in government leadership requires ethics involving individuals, organizations, and professions in order to keep individuals, organizations, and professions in order to maintain professionalism, integrity, and prevent corruption, collusion, and prevent problems of corruption, collusion and nepotism. Successful collaborative leadership requires ethics of governance for effectiveness in building trust, avoiding conflicts of interest, and motivating trust. trust, avoid conflicts of interest, and motivate team members to achieve common goals.

Keywords : *Ethics, Collaboration, Collaborative Leadership*

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance*) merupakan salah satu tujuan utama pembangunan nasional. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan profesionalisme dan integritas dari penyelenggara negara. Keberhasilan atau kegagalan pemerintahan dalam mencapai tujuan pembangunan tidak hanya tergantung pada kebijakan dan peraturan yang diterapkan, tetapi juga pada moral dan nilai-nilai yang menguatkan kesejahteraan masyarakat.

Proses transformasi dari globalisasi pada abad 20-21 bisa difahami sebagai evolusi dan modernisasi administrasi maupun manajemen publik, terjadinya penguatan atas demokratisasi atas penyelenggaraan pemerintahan seperti juga munculnya konsep *governance*, serta perubahan struktur institusi pemerintahan yang mengedepankan prinsip kerjasama maupun *partnership* antar dan inter organisasi publik maupun jaringan dengan organisasi non-publik dengan tujuan utama adalah memperkuat kapasitas publik untuk mengambil peran dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Tuntutan publik terhadap tampilan pemerintahan dan penyelenggara pemerintahan yang beretika dan melayani semakin tinggi, karenanya pemahaman tata kelola pemerintahan yang beretika menjadi keniscayaan, instansi pemerintah dengan berbagai kelebagaannya yang diselenggarakan para praktisi pemerintahan termasuk aparatur sipil negara perlu memahami konsep, norma dan praktek etika pemerintahan.

Memahami pentingnya etika pemerintahan tidaklah semata-mata mengindoktrinasikan apa yang boleh dan tidak dikerjakan (baik, buruk, benar salah) oleh aparat pemerintahan, tetapi lebih dari itu adalah upaya yang terus menerus dilakukan untuk meningkatkan profesionalisme agar tindakan dan perilakunya mencerminkan *ethical reflection* (refleksi etis) yang bermanfaat bagi penyempurnaan pelayanan kepada masyarakat, sehingga dapat tercipta birokrasi pemerintahan yang bersih dan profesional. (Endah, 2018)

Etika pemerintahan merupakan ajaran untuk berperilaku yang baik dan benar sesuai dengan nilai-nilai keutamaan yang berhubungan dengan hakikat manusia. Sumaryadi (2010) mengatakan bahwa etika pemerintahan mengacu pada kode etik profesional khusus bagi mereka yang bekerja dan untuk pemerintahan. Etika pemerintahan melibatkan aturan dan pedoman tentang panduan bersikap dan berperilaku untuk sejumlah kelompok yang berbeda dalam lembaga pemerintahan, termasuk para pemimpin terpilih (seperti presiden dan kabinet menteri), DPR (seperti anggota parlemen), staf politik dan pelayan publik. (Ismail, 2017)

Di dalam implementasinya etika pemerintahan itu meliputi etika yang menyangkut individu sebagai anggota organisasi pemerintahan, juga meliputi etika organisasi pemerintahan serta etika profesi organisasi pemerintahan, yang ketiganya dalam implementasinya bermuara pada nilai-nilai etis yang terkandung baik pada peraturan perundangan, nilai-nilai agama, nilai-nilai sosial budaya, nilai-nilai dalam asas penyelenggaraan pemerintahan dan nilai lainnya yang ada kaitannya dalam penyelenggaraan Negara. (Labolo, 2016)

Rasyid (2001) mengatakan pemerintahan merupakan institusi netral, dimana di dalamnya terbuka peluang bagi pemimpinnya untuk berbuat baik atau sebaliknya. Apabila pemerintahan dikelola oleh pemimpin yang memegang etika kepemimpinan pemerintahan maka rakyat akan menerima sebagai rahmat. (Labolo, 2016)

Peran terbesar yang harus dijalani oleh seorang pemimpin pemerintahan adalah bagaimana memberikan pencerahan bagi masa depan organisasi yang dipimpinnya, dengan menciptakan situasi dan kondisi kondusif serta memungkinkan berlangsungnya proses-proses manajemen secara optimal, pemimpin pemerintahan dalam melaksanakan tugas, fungsi dan dalam berperilaku, perlu memahami dan mengimplementasikan makna dari etika.

Dalam era dinamika sosial dan tuntutan kemajuan, kepemimpinan pemerintahan bukan lagi sekedar tentang pelaksanaan kebijakan, tetapi juga tentang keberlanjutan nilai-nilai etika

dalam setiap langkah tindakan. Artikulasi etika penyelenggaraan negara menjadi krusial dalam membentuk fondasi karakter pemerintahan yang sehat dan berkelanjutan.

Menurut Sorni Paskah Daeli dalam penyelenggaraan pemerintahan, etika dan integritas kepemimpinan menjadi salah satu fokus penting di tengah-tengah komitmen, dalam menjunjung tinggi nilai-nilai etika berbanding dengan kepentingan pribadi atau golongan. Oleh sebab itu, etika dan integritas tidak dapat dipisahkan, kepemimpinan tanpa etika dan integritas akan membawa organisasi dalam bahaya yang serius. Keputusan seorang pimpinan akan memberikan pengaruh besar pada suatu organisasi. (PMK, 2023)

Dalam konteks etika kepemimpinan pemerintahan, pemimpin perlu menciptakan dinamika yang adil di dalam organisasi untuk menciptakan suasana kondusif. Pekerjaan harus dianggap sebagai tanggung jawab yang tidak memberatkan, melainkan sebagai panggilan, rahmat, amanah, seni, dan bagian dari ibadah. Prioritas utama adalah komitmen pada pengabdian kepada masyarakat, bukan sekedar posisi yang menjadi lambang kebanggaan dan kemegahan pribadi. Pemimpin harus memahami bahwa tanggung jawabnya berkembang dari kepercayaan orang yang dipimpinnya.

Dengan menyadari etika kepemimpinan pemerintahan maka pemimpin pemerintahan perlu menumbuhkan dinamika yang fair dalam organisasi yang dapat menciptakan suasana kondusif bagi semua pihak, untuk menjalani dan menikmati pekerjaan sebagai bagian dari tanggung jawab, tanpa merasa terbebani apalagi merasa tertekan. Pekerjaan itu harus dipahami sebagai panggilan, rahmat, amanah, seni dan bagian dari ibadah, sehingga komitmen pengabdian harus ditempatkan sebagai prioritas. Bagi seorang pemimpin pemerintahan siapapun dia dan dalam bentangan lahan pengabdian apapun, harus memahami bahwa ia mengembangkannya dari orang yang dipimpinnya dan tidak sekedar menjadi posisi itu sebagai lambang kebanggaan dan kemegahan.

Pemahaman akan etika kepemimpinan pemerintahan merupakan landasan berpijak penting dalam melaksanakan pola-pola kerja, baik yang bersifat hirarkhis formal maupun hubungan yang sifatnya non formal. Dengan demikian maka pemimpin dan yang dipimpin, akan bekerjasama dalam koridor yang sifatnya saling melengkapi, tidak sekedar pada pola hubungan atasan dan bawahan.

Dalam konteks yang semakin kompleks, keberhasilan kepemimpinan pemerintahan tidak lagi hanya diukur dari pencapaian target atau pelaksanaan kebijakan semata, tetapi juga dari sejauh mana nilai-nilai etika diterapkan dalam setiap tindakan. Kepemimpinan pemerintahan yang beretika tidak hanya menciptakan lingkungan kerja yang sehat, tetapi juga mempengaruhi cara personil bekerja bersama dan berkolaborasi.

Kerjasama atau kolaborasi merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu satu sama lain. (Saleh Choirul, 2020). Secara etimologi, kolaboratif berasal dari kata *co* dan *labor* yang memiliki arti sebagai penyatuan tenaga atau peningkatan kemampuan yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau disepakati bersama. Selanjutnya, istilah kolaborasi sering digunakan untuk menjelaskan proses penyelesaian pekerjaan yang melibatkan lintas batas, lintas sektor, atau lintas hubungan. (Wargadinata Ella, 2017)

Namun, dalam praktiknya, etika penyelenggara negara seringkali diabaikan dalam kolaborasi antar personil dalam kepemimpinan pemerintahan. Hal ini dapat menimbulkan berbagai permasalahan, seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk menghadirkan etika penyelenggara negara pada kolaborasi antar personil dalam kepemimpinan pemerintahan. Upaya ini penting untuk menjaga profesionalisme dan integritas penyelenggara negara, serta untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih.

Kolaborasi antar personil dalam kepemimpinan pemerintahan adalah kerjasama yang dilakukan oleh berbagai pihak dalam pemerintahan, baik antar kementerian/lembaga, antar daerah, maupun antar instansi pemerintahan dengan masyarakat. Kolaborasi antar personil dalam kepemimpinan pemerintahan diperlukan untuk mencapai tujuan pemerintahan secara efektif dan efisien.

Konsep kepemimpinan dalam konteks governance bukanlah konsep kepemimpinan tradisional yang selama ini dikenal. Secara umum ada delapan aspek mendasar yang membedakan konsep kepemimpinan tradisional dan kepemimpinan modern. Pertama, kepemimpinan tradisional mendapatkan kekuasaan dari posisi dan kewenangan yang dimiliki, sementara kepemimpinan kolaboratif memahami kekuasaan dimiliki oleh semua pihak yang terlibat. Kedua, kepemimpinan tradisional menguasai informasi hanya untuk dirinya (monopoli), sementara kepemimpinan kolaboratif akan membagikan informasi untuk semua-*shared information*. Ketiga, kepemimpinan tradisional tidak selalu mendengarkan pendapat orang lain ketika mengambil keputusan (otoriter), di sisi lain kepemimpinan kolaboratif selalu mendorong semua pihak yang terlibat untuk memberikan ide maupun gagasan (demokrasi). Keempat, menentukan dan atau menyetujui solusi, sementara kepemimpinan kolaboratif melakukan fasilitasi kepada seluruh pihak yang terlibat untuk selalu melakukan curah pendapat untuk memperoleh keputusan yang disetujui bersama. Kelima, kepemimpinan tradisional hanya akan menyisihkan waktu dan menggunakan sumber daya ketika diperlukan, di sisi lain kepemimpinan kolaboratif memberikan waktu dan sumberdaya untuk kepentingan semua pihak yang terlibat. Keenam, membatasi peran dan tanggungjawab masing-masing, sementara kepemimpinan kolaboratif memberi kesempatan untuk mengembangkan peran dan tanggungjawab semua pihak yang terlibat. Ketujuh, kepemimpinan tradisional mencari solusi atas fenomena (simptomatik), di sisi lain kepemimpinan kolaboratif berusaha mencari solusi untuk mengatasi akar masalah. Kedelapan, kepemimpinan tradisional melakukan penilaian kinerja berdasarkan aturan normatif, sementara kepemimpinan kolaboratif menawarkan umpan balik sesegera mungkin secara personal. (Wargadinata Ella, 2017)

Kolaborasi dalam penyelenggaraan pemerintahan mengimplikasikan tanggung jawab yang sama bagi semua pihak terlibat dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, kolaborasi memerlukan kehadiran pihak-pihak yang duduk bersama dengan kekuatan yang seimbang. Beberapa prasyarat penting melibatkan kepemimpinan yang kuat, mediator netral, peran birokrasi yang signifikan, negosiasi yang efektif, dan pengambilan keputusan berdasarkan kesepakatan dan saling menghormati. Kesuksesan Collaborative Governance sangat tergantung pada implementasi elemen-elemen tersebut.

Untuk memahami bagaimana etika penyelenggara negara makalah ini akan merunut bagaimana etika penyelenggara negara dapat diimplementasikan dalam kolaborasi antar personal dalam kepemimpinan kolaboratif pemerintahan.

METODE

Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif bersifat studi kepustakaan (Library Research) yang menggunakan buku-buku dan literatur-literatur lainnya sebagai objek yang utama yang akan menghasilkan informasi berupa catatan dan data deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut O'Leary, 2010 Secara etimologi, collaborative berasal dari kata *co* dan *labor* yang mengandung makna sebagai penyatuan tenaga atau peningkatan kemampuan yang dimanfaatkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau yang telah disepakati bersama. Selanjutnya, kata kolaborasi sering kali digunakan untuk menjelaskan proses penyelesaian pekerjaan yang bersifat lintas batas, lintas sektor, lintas hubungan ataupun lintas organisasi bahkan lintas negara sekalipun. (Saleh Choirul, 2020)

Adapun secara terminologi kolaborasi mengandung makna yang sangat umum dan luas yang mendeskripsikan adanya situasi tentang terjadinya kerja sama antara dua orang ataupun institusi atau lebih yang saling memahami permasalahan masing-masing secara bersama-sama dan berusaha untuk saling membantu memecahkan permasalahan masing-masing secara bersama-sama pula.

Tata kelola Pemerintahan-Governance yang menggunakan prinsip kolaborasi- Collaborative governance pada akhir-akhir ini muncul sebagai konsep alternatif dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat lokal ketika permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah semakin kompleks O'Leary, 2008), sementara birokrasi sebagai aktor

tunggal pelaksana semakin terseok dan terbelenggu dengan segala keterbatasan dan patologi yang menghinggapinya. Kolaborasi dalam governance diartikan sebagai proses fasilitasi dan pelaksanaan terhadap pengaturan peran multi organisasi terhadap masalah yang tidak mampu dipecahkan oleh organisasi tunggal. (Wargadinata Ella, 2017)

Definisi collaborative governance dijelaskan oleh Ansell dan Gash: A governing arrangement where one or more public agencies directly engage non-state stakeholders in a collective decision-making process that is formal, consensus-oriented, and deliberative and that aims to make or implement public policy or manage public programs or assets (Wargadinata Ella, 2017)

Sebuah pengaturan dimana satu atau beberapa lembaga publik dan lembaga non-publik terlibat dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bersifat formal, berlandaskan pada konsensus, dan menggunakan pertimbangan dengan tujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik atau mengelola program-program atau aset publik. Lebih lanjut dijelaskan bahwa kolaborasi dapat memberi kepuasan kepada setiap pihak yang terlibat, A principle characteristic of collaborative processes is that they lead to outcomes satisfactory to all parties involved. (Gray, 2004: 50). (Wargadinata Ella, 2017)

Kolaboratif governance menurut Innes and Booher, 2003 akan berhasil apabila terjadi dialog murni-Authentic dialogue yang memungkinkan semua pihak memiliki suara, berdiskusi atas kepentingan bersama, memiliki pemikiran yang terbuka, menyadari posisi masing-masing dan memiliki keinginan untuk mencari solusi yang berguna bagi semua pihak. (Wargadinata Ella, 2017).

Mengapa collaborative governance? Menurut O'Leary 2010 dalam (Wargadinata Ella, 2017) setidaknya ada enam alasan utama mengapa collaborative governance dikatakan sebagai pilihan terbaik dalam penyelenggaraan pemerintah, yaitu:

1. Tantangan masalah publik makin kompleks dan sulit ditangani secara monopoli oleh satu organisasi pemerintah, membutuhkan multi pendekatan;
2. Beberapa organisasi pemerintah telah melakukan mekanisme outsourcing untuk meningkatkan kapasitas organisasinya, mekanisme ini tentunya membutuhkan tambahan anggaran yang membebani anggaran pemerintah. Mekanisme outsourcing pada dasarnya menggunakan prinsip kolaborasi antara organisasi pemerintah dan organisasi non-pemerintah atas dasar kontrak kerja.
3. Terjadi perubahan signifikan mengenai hubungan antar pemerintah pada tingkat yang berbeda, antara pemerintah pusat-daerah yang memungkinkan terciptanya mekanisme kerja atas dasar prinsip kerjasama/cooperation, kolaborasi dan pertukaran informasi
4. Meningkatkan efektivitas program/kegiatan yang dibiayai oleh pemerintah dapat mendorong pegawai pemerintah untuk melakukan identifikasi cara-cara baru untuk menyediakan pelayanan terbaik bagi masyarakat
5. Perkembangan teknologi yang mempermudah pertukaran informasi untuk pengambilan keputusan yang integratif melalui prinsip interoperabilitas
6. Masyarakat mencari arena baru untuk mengambil dan berperan atau masuk dalam tata kelola pemerintahan/governance, yang memungkinkan terciptanya kolaborasi dalam pemecahan masalah serta pengambilan keputusan

Adagium yang tepat yang mendasari kepemimpinan kolaboratif disampaikan oleh Kozes dan Posner (2007:223) '*leadership is not a solo act, it's a team effort*'. Kepemimpinan bukanlah kegiatan yang dilakukan sendiri tapi merupakan tindakan ataupun upaya kelompok. Tantangan terhadap pemimpin saat ini sangat jauh berbeda dengan keadaan masa lalu, konsep kepemimpinan telah berubah sedemikian cepat bukan hanya untuk organisasi publik, tapi juga menjadi tantangan berat bagi eksistensi organisasi swasta. Pengetahuan masyarakat semakin meningkat, nilai-nilai sosial mengalami pergeseran, hubungan pimpinan-masyarakat tidak lagi didasari oleh prinsip feodalisme. Dinamika internal dan pengaruh faktor eksternal turut mempengaruhi prinsip-prinsip kepemimpinan di era modern ini (Wargadinata Ella, 2017)

Peran kepemimpinan dalam pemerintahan kolaboratif menurut Chrislip & Larson, 1994 adalah membantu stakeholder menemukan solusi yang bersifat win-win, pemimpin adalah fasilitator atas proses kolaboratif. Mandell & Keist 2009 mengatakan kepemimpinan

kolaboratif tidaklah diniatkan untuk merancang strategi untuk memecahkan masalah tetapi menciptakan sinergi strategi antar stakeholders yang akan menuntun pada solusi yang inovatif. Pada tataran proses inilah kolaboratif governance berbeda dengan forum kerjasama lainnya, bukan menyelesaikan tugas semata tetapi mencari cara atau jalan baru dalam memecahkan masalah. Pimpinan harus bertindak sebagai katalis maupun fasilitator, membangun salingketergantungan dan tidak bertindak otoriter. Kepemimpinan tidak merujuk pada satu individu tertentu tetapi merujuk pada proses bagaimana setiap pihak dapat saling berinteraksi dengan cara-cara yang baru yang saling memanfaatkan untuk meningkatkan kapasitas masing-masing... leadership does not refer to one person but rather the process of getting all members to interact in new ways that tap into and leverage from their strengths ...” (Wargadinata Ella, 2017)

Kim 2009 Menggunakan prinsip kolaborasi dalam tataran pemerintahan tingkat lokal dikatakan menjadi alternatif terbaik ketika pemerintah daerah menghadapi tantangan yang makin kompleks. Di sisi lain tumbuhnya kemitraan antara publik-swasta, semakin pentingnya peran lembaga non pemerintah, tumbuhnya jiwa voluntirsukarela di kalangan masyarakat menjadikan proses kolaborasi dapat tumbuh subur dengan menggunakan kekuatan-kekuatan ini. Kepemimpinan kolaboratif menjadi penting ketika kegiatan yang dilakukan melibatkan hubungan antar pemerintah (lokal--regional-nasional), hubungan antar organisasi, antar sektor dan apabila melibatkan organisasi skala internasional. (Wargadinata Ella, 2017)

Kepemimpinan kolaboratif membutuhkan etika penyelenggara pemerintahan untuk berjalan secara efektif. Etika penyelenggara pemerintahan dapat membantu pemimpin untuk membangun kepercayaan dan kerja sama antar anggota tim, serta untuk menghindari konflik kepentingan.

Etika penyelenggara pemerintahan dapat memperkuat kepemimpinan kolaboratif dengan meningkatkan efektivitas dan efisiensi kolaborasi. Etika penyelenggaraan pemerintahan dapat membantu pimpinan untuk membuat keputusan yang adil dan transparan, serta untuk memotivasi anggota tim untuk bekerja sama mencapai tujuan bersama.

Etika penyelenggara pemerintahan yang diwujudkan dalam nilai-nilai kejujuran, keadilan, transparansi, dan profesionalisme, merupakan dasari dari kepemimpinan kolaboratif. Nilai-nilai tersebut penting untuk membangun kepercayaan, komunikasi, dan kolaborasi antar anggota tim.

SIMPULAN

Pentingnya etika pemerintahan tidak hanya sebatas menentukan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan oleh aparat pemerintahan, tetapi juga mencakup upaya terus-menerus untuk meningkatkan profesionalisme agar tindakan dan perilaku mencerminkan refleksi etis yang bermanfaat bagi pelayanan kepada masyarakat.

Konsep kepemimpinan dalam governance menekankan pada kepemimpinan kolaboratif yang memperhatikan kekuasaan bersama, berbagi informasi, mendengarkan pendapat, fasilitasi pengambilan keputusan bersama, pemberian waktu dan sumber daya untuk kepentingan semua pihak, pengembangan peran dan tanggung jawab, penyelesaian akar masalah, dan umpan balik personal.

Dengan demikian, penerapan etika pemerintahan dalam kolaborasi antar personil dalam kepemimpinan pemerintahan menjadi landasan yang vital untuk mencapai Good Governance. Etika ini memastikan bahwa nilai-nilai moral dan integritas tidak hanya menjadi retorika, tetapi diimplementasikan dalam tindakan dan keputusan yang mengarah pada pelayanan masyarakat yang baik, profesional, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Endah, K. (2018). ETIKA PEMERINTAHAN DALAM PELAYANAN PUBLIK. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 4(1).
- Ismail. (2017). *Etika Pemerintahan Norma, Konsep dan Praktek Etika Pemerintahan Bagi Penyelenggara Pelayanan Pemerintahan* (M. M. Nasrudin, Ed.; 1st ed.). Lintang Rasi Aksara Books.

- Labolo, M. (2016). *Modul Etika Pemerintahan*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- PMK. (2023, July 27). *Etika dan Integritas Kepemimpinan Dalam Pemerintahan di Indonesia Perlu Ditingkatkan*.
- Saleh Choirul. (2020). *Konsep, Pengertian, dan Tujuan Kolaborasi*. Pustaka Universitas Terbuka.
- Wargadinata Ella. (2017). KEPEMIMPINAN KOLABORATIF. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah (JIAPD)*, 8(1), 1–14.